

**KEGAGALAN PARTAI POLITIK ISLAM
(TELA'AH TERHADAP POLITIK PARTAI MASYUMI)**



SKRIPSI

**DIAJUKAN PADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

Oleh:

ARISANDI

99373421

PEMBIMBING:

- 1. DR. H. ABD. SALAM ARIEF, MA**
- 2. GUSNAM HARIS, S.Ag.M.Ag**

**JINAYAH SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA**

2004



**KEGAGALAN PARTAI POLITIK ISLAM
(Tela'ah Terhadap Politik Partai Masyumi)**

Dr. H. Abd. Salam Arief, MA
Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

NOTA DINAS

Lap. : 1 Eksemplar

Hal : Skripsi

Saudara Arisandi

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan-perbaikan sepenuhnya terhadap skripsi saudara Arisandi yang berjudul **"Kegagalan Partai Politik Islam (Tela'ah terhadap Politik Partai Masyumi)"** kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam. Selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqasyahkan.

Akhirnya sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Juli 2004 M
26 Jumadil Awal 1425 H

Pembimbing I



Dr. H. Abd. Salam Arief, MA
NIP. 150 216 531

Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag
Dosen Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Lap. : 1 Eksemplar

Hal : Skripsi

Saudara Arisandi

Kepada:

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di

Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

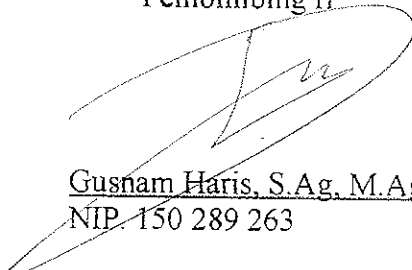
Setelah, mengoreksi, dan mengadakan perbaikan-perbaikan sepenuhnya terhadap skripsi saudara Arisandi yang berjudul **"Kegagalan Partai Politik Islam (Tela'ah terhadap Politik Partai Masyumi)"** kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu dalam Hukum Islam. Selanjutnya dapatlah kiranya segera dimunaqasyahkan.

Akhirnya sebelum dan sesudahnya kami haturkan terima kasih. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 14 Juli 2004 M
26 Jumadil Awal 1425 H

Pembimbing II


Gusnam Haris, S.Ag, M.Ag
NIP. 150 289 263

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul,

KEGAGALAN PARTAI POLITIK ISLAM (TELA'AH TERHADAP POLITIK PARTAI MASYUMI)

Yang disusun Oleh:

ARISANDI
99373421

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah pada hari Rabu Tanggal 17 Jumadi as-Sani 1425 H / 4 Agustus 2004 M, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 7 Rajab 1425 H
23 Agustus 2004 M



Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Drs. H. A. Malik Madany, M.A
NIP. 150 182 698

Panitia Munaqasyah

Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zein MA
NIP. 150 228 207

Sekretaris Sidang

Drs. Malik Ibrahim
NIP. 150 260 056

Pembimbing I

Dr. H. Abd Salam Arief MA
NIP. 150 231 514

Pembimbing II

Gusnam Haris S.Ag. M.Ag
NIP. 150 289 263

Penguji I

Dr. H. Abd Salam Arief MA
NIP. 150 231 514

Penguji II

Drs. H. Fuad Zein MA
NIP. 150 228 207

KATA PENGANTAR

الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام. أشهد ان لا اله إلا الله وأشهد ان محمداً رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد.

Puji Syukur dihaturkan kepada Sang Khaliq yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, anugerah, serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Salawat serta salam selalu dipersembahkan kepada nabi Muhammad SAW. yang senantiasa tak pernah lelah mengajak dan membimbing manusia ke arah hidayah-Nya.

Meskipun menulis skripsi ini merupakan tahap awal dari sebuah perjalanan panjang cita-cita akademis, namun penulis berharap semoga karya ilmiah ini mempunyai nilai kemanfaatan yang luas bagi perkembangan ilmu pengetahuan, khususnya pengetahuan dibidang politik Islam.

Keseluruhan penulisan karya ilmiah ini telah melibatkan berbagai pihak. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penulis menghaturkan terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ketua dan sekretaris Jurusan Jinayah Siyasah Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah memberi izin bagi dipilihnya judul bahasan skripsi ini.
3. Bapak Dr. H. Abd. Salam Arief, MA dan Bapak Gusnam Haris S. Ag, M. Ag selaku pembimbing yang dengan sabar telah membaca, mengoreksi, dan memberikan bimbingan kepada penulis demi terselesainya penulisan skripsi ini.
4. Bapak Ibu, serta teman-teman yang telah senantiasa memberikan dukungan baik moral spiritual maupun materi.

Mudah-mudahan jasa-jasa mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT. Amin. Terakhir kali, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, sehingga saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan.

Yogyakarta, 1 Juli 2004 M
12 Jumadil Awal 1425 H

Penyusun



Arisandi
99373421

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan Skripsi ini berpedoman pada surat keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

I. Konsonan Tunggal.

Hurup Arab	Nama	Hurup Latin	Nama
ا	alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	b	be
ت	ta'	t	te
ث	sa'	s	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	ha'	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zal	z	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ta	t	te (dengan titik di bawah)
ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	'el
م	mim	m	'em
ن	nun	n	'en
و	waw	w	w
ه	ha'	h	ha
ء	hamzah	'	apostrof
ي	ya	y	ye

II. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis Rangkap

متعددة عدة	di tulis di tulis	muta'addidah 'iddah
---------------	----------------------	------------------------

III. Ta' *marbuttah* di Akhir Kata

Bila dimatikan ditulis *h*

حكمة علة	di tulis di tulis	hikmah 'illah
-------------	----------------------	------------------

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua itu terpisah, maka di tulis dengan *h*.

كرامة الأولياء زكاة الفطر	di tulis di tulis	Karāmah al-auliya' Zakāh al-fītri
------------------------------	----------------------	--------------------------------------

IV. Vokal Pendek

فعل	Fatha	di tulis di tulis	<i>A</i> <i>fa'ala</i>
نكر	Kasrah	di tulis di tulis	<i>i</i> <i>zukira</i>
يذهب	dammah	di tulis di tulis	<i>u</i> <i>yazhabu</i>

V. Vokal Panjang

1	Fathah + alif		di tulis	\bar{a}
2	Fatha + ya' mati	جاهلية	di tulis	<i>jāhiliyyah</i>
3	Kasrah + ya mati	تنسى	di tulis	\bar{a}
4	Dammah + wawu mati	كريم	di tulis	<i>karīm</i>
		فروض	di tulis	\bar{u}
			di tulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1	Fatha + ya mati		di tulis	<i>ai</i>
2	Fatha + Wawu mati	بينكم	di tulis	<i>bainakum</i>
		قول	di tulis	<i>au</i>
			di tulis	<i>qaul</i>

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata dipisahkan dengan apostrof

انتم	di tulis	<i>a'antum</i>
اعدت	di tulis	<i>u'iddat</i>
لئن شكرتم	di tulis	<i>la'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang Alif + Lam

Bila diikuti huruf qamariyah maupun syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf "al"

القران	di tulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	di tulis	<i>al-Qiyās</i>
السماء	di tulis	<i>al-Samā'</i>
الشمس	di tulis	<i>al-Syams</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat Ditulis menurut penulisannya

ذوي الفروض	di tulis	<i>zawī al-furūd</i>
اهل السنة	di tulis	<i>Ahl al-sunnah</i>

MOTTO

*Rasa Bahagia Lebih Banyak Timbul
Dari Kepuasan Hati Yang Tidak Tertekan Dan Bebas, Berani
Mengatasi Kesulitan-kesulitan Hidup, Tidak Mengalahi
Kepada Keadaan, Tidak Berputus Asa, Dan Percaya Kepada
Kekuatan Yang Ada Pada Diri Sendiri (M. Natsir)*



ABTRAK

Kolonialisme-impralisme yang dialami Indonesia telah meninggalkan virus perpecahan dalam tubuh umat Islam. Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, namun kuantitas tidak dibarengi dengan pandangan yang sama terhadap Islam dan politik. Pemahaman umat terhadap politik terbagi dua tendensi pemikiran, satu pihak memandang bahwa Islam merupakan agama yang lengkap, yang telah mengatur semua sendi kehidupan, termasuk juga di dalamnya urusan yang berkenaan dengan politik (Negara). Di pihak lain, berpandangan bahwa Islam hanya sebatas agama tidak lebih dari itu. Adapun urusan yang berkenaan dengan politik, harus diserahkan kepada manusia itu sendiri untuk memikirkan dan melaksanakannya, Islam tidak perlu dijadikan ideologi negara.

Masyumi merupakan termasuk dalam golongan pertama, partai ini didirikan oleh hampir semua organisasi Islam, baik pasca maupun pra kemerdekaan RI. Lahirnya partai ini ditujukan guna untuk menjaga dan memperjuangkan kepentingan umat Islam Indonesia. Selepas diproklamirkannya kemerdekaan RI, pada 7 November 1945, diadakanlah muktamar umat Islam Indonesia di Yogyakarta, di dalam-nya diambil kesepakatan bahwa diperlukannya suatu wadah untuk menampung aspirasi umat Islam dan menyalurkannya melalui wadah tersebut. Maka partai Masyumi-pun dibentuk, Partai Masyumi adalah partai Islam terbesar dan satu-satunya partai bagi umat Islam pada zamannya. Namun dalam kenyataannya, Masyumi selaku partai dan organisasi Islam terbesar ketika itu gagal dalam merealisasikan tujuannya.

Karena itu, Guna mendapatkan kejelasan sejarah dan hasil yang maksimal, dalam penyusunan skripsi ini, penyusun menggunakan pendekatan Politik dan Historis. yaitu menela'ah Masyumi dari segi politik dan berusaha menggambarkan dan memaparkan perjalanan Masyumi dari awal berdirinya (1945) hingga partai ini dibubarkan (1960). Kemudian data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif-induktif.

Dalam rangka merealisasikan tujuan partai, Masyumi acapkali dibenturkan dengan kekuatan dari luar partai serta di perburuk dengan lahirnya beberapa penyakit dari dalam tubuh partai, misalnya, timbulnya perpecahan antara anggota dalam tubuh partai, hingga keluarnya tiga organisasi Islam (Perti, PSII, dan NU) dari Masyumi juga telah ikut melemahkan kedudukan partai dalam politik di pentas nasional. Hingga akhir hayat umur partai, masyumi sulit menawarkan produknya yang telah dijanjikan pada umat dan masyarakat dalam berbagai kesempatan. Masyumi sebagai partai Islam terbesar pada zamannya gagal dalam merealisasikan tujuannya melalui jalan formal yaitu melalui pemilu dan parlemen. Malah acapkali didomistikasi dan dimarjinalkan oleh lawan politik, mulai dari istilah "kepala batu" hingga di-cap sebagai gerakan sparadis. Oleh karena itu dari beberapa data yang didapat kemudian dianalisis secara kualitatif, penyusun berkesimpulan bahwa Masyumi telah gagal dalam menjalankan tugasnya selaku lembaga institusi yang memperjuangkan aspirasi umat Islam dalam kontes perpolitikan nasional.

**KEGAGALAN PARTAI POLITIK ISLAM
(TELA'AH TERHADAP POLITIK PARTAI MASYUMI)**

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
NOTA DINAS.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iv
Halaman Kata Pengantar	v
Daftar Transliterasi.....	vii
MOTTO.....	x
ABTRAKSI	xi
Daftar Isi	xii
Daftar Tabel	xiv
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Tela'ah Pustaka	9
E. Kerangka Teoretik	12
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	20
BAB II. ISLAM DAN POLITIK	22
A. Pengertian Politik.	22
B. Islam dan Politik, Tinjauan Teoritis	27
C. Politik Islam di Indonesia.	36
1. Pra Kemerdekaan RI.	36

2. Pasca Kemerdekaan RI.....	49
BAB III. MASYUMI DI PENTAS NASIONAL.....	56
A. Masyumi.....	56
1. Lahir dan dibekukannya Masyumi.....	56
2. Tujuan Masyumi.....	63
B. Partai Masyumi di Pentas Nasional.....	68
BAB IV. ANALISIS KEGAGALAN PARTAI ISLAM (MASYUMI).....	92
1. Faktor Eksternal (dari luar partai).....	95
2. Faktor Internal (dari dalam tubuh partai).....	96
BAB V. PENUTUP.....	101
A. Kesimpulan.....	101
B. Saran-saran.....	103
DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
I. DAFTAR TERJEMAHAN.....	I
II. BIOGRAFI ULAMA/TOKOH.....	II
III. CURRICULUM VITAE.....	IV

DAFTAR TABEL

- Table I. Keseluruhan perolehan suara dan persentase Empat Besar peserta pemilu 1955 untuk DPR serta peringkat Masyumi..... hlm. 81
- Table II. Keseluruhan jumlah suara dan kursi pemilu 1955 untuk DPR dan Konstituante..... hlm. 82



BAB. I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.

Sejak berakhirnya kolonialisme barat pada pertengahan abad ke-20, negara-negara muslim mengalami kesulitan dalam upaya mereka mengembangkan sintesis yang memungkinkan (viable) antara praktek dan pemikiran politik Islam dengan negara di daerah mereka masing-masing.¹

Di wilayah teritorial daerah-daerah tersebut, pergumulan politik Islam dan negara sering terjadi. Islam sebagai agama yang mayoritas dianut oleh komunitas masyarakat negara-negara tersebut, yang seharusnya dapat mewarnai kehidupan, baik perorangan, masyarakat, maupun bernegara, malah sebaliknya mereka tidak bisa menonjolkan identitas mereka sebagai kelompok yang paling banyak dari golongan lain. Kenyataan dan keadaan inilah yang menjadikan kesedihan bagi umat, mereka banyak tetapi adanya seperti tidak ada, dan menjadi pekerjaan rumah (PR) bagi umat Islam periode selanjutnya.

Pergumulan ini terjadi tidak saja disebabkan oleh faktor eksternal Islam saja, tetapi juga dari faktor internal Islam itu sendiri, Sebagian kalangan umat Islam berpandangan bahwa Islam itu lengkap, menyeluruh, dan sempurna, yang telah mengatur segala sendi kehidupan, mulai dari hal-hal yang di anggap sepele hingga hal-hal yang dianggap besar. Bagaimana Islam mengatur adab seorang muslim masuk WC hingga bagaimana Islam menawarkan sistem bernegara, "Islam adalah sebuah totalitas yang padu yang menawarkan pemecahan semua

¹ Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, cet.I, (Jakarta: Paramadina, 1998), hlm 2.

masalah kehidupan”², golongan ini berkeinginan agar seluruh kerangka kehidupan yang dijalankan oleh umat harus berdasarkan Islam, Islam harus dilegalformalkan dalam kehidupan, baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya dan sebagainya.

Dari kerangka berpikir seperti inilah lahir libido (keinginan) untuk menjadikan Islam sebagai dasar dan ideologi negara, bahwa syari'ah harus diterima sebagai konstitusi negara. pandangan holistik terhadap Islam semacam ini, menurut Bahtiar Effendy akan melahirkan implementasi yang cenderung memahami Islam secara “literal”, yang hanya menitik beratkan pada dimensi luar dari Islam dan agak melupakan dimensi kontekstualnya dalam memahami prinsip-prinsip Islam, karena itu apa yang memungkinkan tersirat dibalik penampakan-penampakan tektualnya hampir-hampir terabaikan dan terlupakan.³

Namun, pada komunitas golongan Islam lain berpandangan agak kontradiktif dengan kelompok pertama, kalangan berpendapat bahwa, Islam memang mengatur soal-soal yang berhubungan dengan ibadah kepada tuhan, tetapi hal-hal yang hubungannya dengan kehidupan manusia, yang selalu berubah oleh kekuatan evolusi, harus dikembalikan pada kekuatan manusia itu sendiri untuk memikirkannya, dan yang terpenting tidak keluar dari prinsip-prinsip, nilai-nilai yang telah diatur oleh Islam. Menurut aliran ini, selagi umat Islam dalam melaksanakan kehidupannya baik berpolitik, bernegara dan lain sebagainya, dijiwai dengan jiwa Islam maka itu tidak menyimpang dari garis mekanisme yang telah ditentukan oleh Islam yang dibawa oleh Muhammad SAW. Perlu dicatat

² *Ibid.*, hlm. 7

³ *Ibid.*, hlm. 9

bahwa aliran ini juga mengakui “al-Qur’an” mengandung “nilai-nilai” dan ajaran-ajaran yang bersifat etis...tentang nilai aktivitas sosial dan politik umat manusia seperti prinsip-prinsip: Keadilan, persamaan, persaudaraan dan kebebasan.⁴

Terlepas dari latar belakang dan tendensi pemikiran di atas. Hubungan antara Islam dan negara di dunia Islam bukanlah persoalan yang baru untuk diperdebatkan, di Indonesia pasca kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945, perbincangan akan hal ini semakin memanas yang memang sebelumnya telah terjadi hubungan yang kurang harmonis. Indonesia yang ketika itu sedang mencari bentuk negara dan belum menemukan “*character building*” yang cocok untuk bahan pertimbangan dalam pembentukan dasar negara, yang nantinya diharapkan dapat mengakomodasikan segala kepentingan tiap-tiap elemen yang ada dalam negara. Perseteruan yang terjadi, kalau boleh dikotomikan, terbagi menjadi dua⁵, satu sisi ada yang mengharapkan Indonesia berideologikan Islam dan disisi lain ada golongan yang tidak menginginkan Islam dijadikan ideologi negara. Kelompok pertama dikomandoi oleh partai-partai (politikus) Islam yang berargumentasikan bahwa masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, sewajarnya-lah Indonesia berideologikan Islam. Pada golongan lain yang diwakili oleh nasionalis dan kaum kiri menolak akan pendapat ini, andaikata Indonesia berideologikan Islam nantinya ditakutkan akan menimbulkan dis-integrasi bangsa dan juga melahirkan kecemburuan sosial bagi agama lain. Indonesia masyarakatnya beragama hitrogen.

⁴ *Ibid.*, hlm. 13

⁵ Baca. Bahtiar Effendy, *Teologi Baru Politik Islam Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi*. (Jogjakarta: Galang Press. 2001). Hlm. 62-110

Perbincangan dan perdebatan ini terus berlanjut sampai ke sidang konstituante, pada akhir perjalanannya dimenangkan oleh kelompok nasionalis bersama panca sila-nya. Hal ini, menurut Dawam Raharjo,⁶ merupakan solusi yang tepat untuk menjembatani perselisihan, tetapi, kenyataan inilah yang menjadikan politik Islam mengalami kekalahan.

Politik Islam Indonesia pada periode ini diwakili oleh Masyumi, kenapa dipilihnya Masyumi sebagai golongan yang mewakili Islam, akan diterangkan pada penjelasan selanjutnya. Masyumi, merupakan partai Islam yang terbesar pasca kemerdekaan, yang awal berdirinya yaitu akhir tahun 1943. Partai ini hasil, bentukan Jepang yang mewadahi perserikatan-perserikatan dan para tokoh-tokoh Islam, yang telah diberi status hukum oleh militer Jepang⁷, bertujuan dengan di satukan-nya potensi seluruh umat Islam itu dapat ikut melestarikan kolonialisme-impralisme di Indonesia.

Di perkembangan selanjutnya, dalam catatan sejarah, Masyumi baru, terbentuk di Yogyakarta tanggal, 7 dan 8 November 1945, yang sebelumnya sebagai fasilitator Jepang, yang di politisi sedemikian rupa untuk mempertahankan penjajahannya. Kemudian, kalau boleh memakai istilah Syafi'i Ma'arif, Masyumi baru, bukan lagi "*made in*" Japan.⁸ Tetapi pembentukannya merupakan suatu keharusan sejarah, lahir dari rasa kecewanya (masyarakat Islam)

⁶ Mukti Ali. *Agama dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer*. (Yogyakarta: PT. Tiara Wacana, 1998), hlm. 135. Disini M Dawam Raharjo Membahas tentang, Agama, Masyarakat dan Negara, Lebih lanjut beliau menjelaskan, Dengan diterimanya pancasila maka seluruh unsur bangsa dan masyarakat bisa bersatu, karena ia adalah merupakan kesepakatan bersama untuk tunduk kepada nilai-nilai yang di sepakati bersama itu.

⁷ A. Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Politik di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin(1959-1965)* (Jogjakarta: IAIN Su-Ka Press, 1988) hlm.22

⁸ *Ibid.*, hlm.30

terhadap partai-partai dan organisasi-organisasi Islam yang dirasakan tidak memadai sebagai wahana perjuangan maka dipandang mendesak agar umat ini merapatkan barisan dalam satu partai politik. Terbentuknya diharapkan nantinya dapat mengakomodasikan segala kepentingan dan dapat mewedahi, mengarahkan potensi yang ada pada umat Islam.

Berdirinya partai ini bukan suatu kebetulan melainkan mempunyai dasar pemikiran yang antipatif terhadap kondisi yang ada saat itu dan perkembangan Islam selanjutnya⁹. Argumen ini di afirmasikan dan di buktikan dengan proses pembentukan partai, diambilnya dan dipakainya lagi "*Masyumi*" sebagai nama, simbol partai, bukan karena semata-mata ada kaitannya dengan organisasi buatan Jepang, tetapi karena hasil musyawarah dari para pencetus partai Masyumi baru itu sendiri. Bagaimana para tokoh Islam (Masyumi) tidak rela kalau potensi umat Islam yang begitu besar di negara Republik Indonesia ini dimanfa'tkan secara destruktif oleh pihak-pihak yang tidak senang terhadap Islam. Untuk itu harus berjuang dalam rangka melestarikan implementasi Syari'at Islam dalam kehidupan bernegara terutama pasca kemerdekaan RI. Terbentuknya partai ini merupakan jawaban positif dari umat Islam terhadap manifesto politik pemerintah tertanggal 1 November 1945 yang mendorong berdirinya partai-partai.¹⁰

Dari berbagai alasan dan semangat itulah, Masyumi telah berhasil menarik hampir semua organisasi Islam, dari beberapa literatur yang ditemukan, ada lima organisasi Islam yang masuk kedalam partai ini, yaitu : NU, Muhammadiyah,

⁹ Thohir Luth, *M. Natsir Dakwah dan Pemikirannya*, (Jakarta, Gema Insani Press, 1999), hlm. 43

¹⁰ *Ibid.*

Persis, PSII, dan Perti¹¹. Organisasi NU dan Muhammadiyah merupakan dua golongan yang menjadi pendukung inti dari Masyumi karena dua organisasi inilah yang memiliki massa yang banyak di bandingkan dengan organisasi-organisasi yang lainnya yang ikut ke dalam Masyumi.

Masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, Masyumi sebagai partai Islam yang terbesar saat itu dan merupakan wadah politik dan aspirasi umat Islam, berkeinginan untuk menjalankan Syari'at Islam di bumi Indonesia, baik individu, masyarakat maupun dalam bernegara, niat ini dapat dilihat dari tujuan (visi-misi) Masyumi, yaitu : *"Terlaksananya ajaran dan hukum Islam didalam kehidupan orang-seorang, masyarakat, dan negara Republik Indonesia menuju keridho'an ilahi"* (pasal: III),¹² Lebih lanjut di jelaskan bahwa untuk mencapai tujuan tersebut dibuatlah tafsiran Anggaran Dasar (AD) dari pasal III tersebut, yang dijadikan usaha-usaha untuk merealisasikannya, yaitu : (1) Menginsafkan dan memperluas pengetahuan dan kecakapan umat Islam dalam perjuangan politik, (2) Menyusun dan memperkokoh barisan umat Islam untuk berjuang dan mempertahankan agama dan kedaulatan negara, (3) Melaksanakan kehidupan rakyat berdasarkan iman dan takwa, pri-kemanusiaan, sosial, persaudaraan dan persamaan hak menurut ajaran Islam, dan (4) Bekerja sama dengan golongan lain dalam lapangan perjuangan untuk menegakkan kedaulatan negara. Di temukan juga, bahwa Masyumi ingin mewujudkan negara RI yang *"Baladatul Thoyyibun*

¹¹ *Ibid.*, hlm. 42 dan juga terdapat pada literatur lain yang menceritakan tentang keanggotaan Masyumi

¹² Delear Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional, Kisah dan Analisis Perkembangan politik Indonesia. 1945-1965*, cet. II, (Bandung, Mizan, tahun 2000), hlm. 493

*Wa Robbun Ghoffur*¹³, dengan tidak meninggalkan kelompok minoritas selain Islam, hal inilah yang menjadi tawaran dan jawaban bagi kelompok-kelompok yang menganggap Islam adalah sesuatu yang perlu ditakuti.

Kemudian pada perjalanan Masyumi selanjutnya, tepatnya pada saat dilaksanakannya pemilu pertama yaitu tahun 1955, partai Masyumi memperoleh suara mayoritas (walaupun tidak mutlak) yaitu ; 45 %¹⁴ dari semua perolehan suara yang ada, yang secara langsung mempengaruhi perolehan kursi di DPR.

Berangkat dari keyakinan bahwa Islam itu lengkap, yang telah mengatur segala urusan dunia maupun akhirat maka lahiriah persepsi bahwa tanpa kekuasaan politik di tangan tidak mungkin hukum Islam akan berjalan wajar dan sebagaimana mestinya di dalam masyarakat khususnya masyarakat Islam¹⁵, walaupun pada langkah praktis selanjutnya agak kurang menegahi dan tepat untuk di jalankan dalam panggung perpolitikan Indonesia.

Beberapa konsep yang di tawarkan oleh Masyumi serta dari hasil suara yang didapat, jika ditela'ah lebih lanjut, akan ditemukan betapa indahnya Islam, bagaimana nasionalisninya Islam, dan bagaimana toleransinya Islam terhadap agama lain, namun harapan tinggal harapan, cita-cita tidak dapat ter-realisasi kan di bumi Indonesia ini. Realitanya jauh dari yang diharapkan, partai Masyumi yang pada awalnya diharapkan menjadi senjata umat Islam Indonesia untuk menyalurkan aspirasi dan pencapaian cita-cita melalui konstitusi politik praktis,

¹³ Thohir Luth, *M. Natsir Dakwah*, hlm.44

¹⁴ Daniel Dhakidae. *Demokrasi dan proses politik*. hlm 185 , Ini merupakan kumpulan karangan dari majalah Prisma, yang menelusuri apa yang selama ini berlangsung di Indonesia.

¹⁵ A. Syafi'i Ma'arif , *Islam dan Politik*, hlm.15.

kalah dalam percaturan politik Indonesia, malah berubah menjadi bumerang.¹⁶ Di kenyataan selanjutnya Masyumi sulit dan tidak berhasil dalam menawarkan dan meyakinkan produk yang diemban yang merupakan cita-cita umat Islam, dan malah melahirkan fenomena, umat Islam selalu dimarginalisasikan dan didomistikasikan oleh negara.

Dari keadaan yang tidak wajar inilah, yang menjadi latar belakang dan mengilhami penulis untuk menggali, mencari dan menela'ah serta menganalisis penyebab kekalahan, kegagalan partai politik Islam, dalam hal ini diperankan oleh partai Masyumi mulai berdirinya partai ini (1945); oleh hampir semua organisasi Islam, baik itu organisasi pra kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan hingga partai ini dibubarkan oleh Soekarno (1960).

B. Pokok Masalah.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok-pokok permasalahan yang ingin dikaji dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sejauh mana perjuangan Masyumi untuk mewujudkan cita-cita partai dan umat ?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan gagalnya Masyumi dalam mencapai cita-cita ?.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

I. Tujuan Penelitian.

¹⁶ Lihat. Bahtiar Efendy. *Islam dan Negara, hlm.62-110*

Sesuai dengan rumusan pokok di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Mengungkap sejarah umat Islam di panggung politik Indonesia khususnya Masyumi pasca kemerdekaan hingga di bubarkannya partai ini.
 - b. Menela'ah dan menganalisis sepak terjang partai Masyumi di pentas perpolitikan Indonesia.
 - c. Membuka dan menggali faktor-faktor penyebab kegagalan partai politik Islam khususnya Masyumi dalam peranannya sebagai lembaga institusi yang menjadi mediator dan fasilitator dalam memperjuangkan aspirasi umat Islam.
2. Kegunaan Penelitian.

Studi ini menggali, mengangkat dan sekaligus menela'ah keberadaan Masyumi dalam percaturan politik di Indonesia dan selanjutnya bagaimana perjalanan Masyumi sebagai partai Islam yang terbesar dalam menggapai tujuan partai dan umat, studi ini diharapkan bermanfaat untuk :

- a. Sumbangan informasi bagi khasanah pengetahuan politik Islam Indonesia Khususnya di bidang pergerakan dan kepartaian.
- b. Sumbangan pemikiran bagi dunia Islam dalam pendewasaan berpolitik.

D. Tela'ah Pustaka.

Setelah penulis mengadakan pelacakan literatur yang membahas tentang politik Islam Indonesia khususnya partai Masyumi, ternyata sudah cukup banyak literatur yang berkaitan dengan masalah ini, baik literatur yang berupa karangan

ilmiah, tulisan-tulisan bebas, skripsi, tesis dan disertasi yang di tulis untuk keperluan dan kebutuhan akan hal ini.

Diantara literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah ini, adalah :

Diliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional*, buku ini membahas tentang kisah dan analisis perkembangan politik Islam Indonesia pada tahun 1945 – 1965, terutama posisi partai Islam dalam lintasan sejarah Ia mendeskripsikan bagaimana suasana pemilu 1955 yang melibatkan begitu banyak partai, buku ini juga mengetengahkan bagaimana kinerja partai-partai Islam yang awal seperti, MASYUMI, PSII, NU, PERTI dalam melintasi zaman revolusi kemerdekaan, demokrasi parlementer dan demokrasi terpimpin, A Syafi'i Ma'arif, *Islam dan Politik di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1954 – 1965)*, buku ini membahas dan menceritakan secara kritis realitas politik praktis partai-partai Islam pada periode demokrasi terpimpin (1954 – 1965). Thohir Luth, *M Natsir Dakwah dan Pemikirannya*, buku ini berisikan perjalanan M Natsir dalam Masyumi serta kegagalannya menggunakan organisasi politik dalam memperjuangkan Islam, kemudian menggunakan organisasi dakwah untuk memperjuangkan Islam. Bahtiar Effendy, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, buku ini membahas tentang hubungan politik Islam dan Negara di Indonesia penulisannya di ilhami terutama oleh fenomena yang mengejutkan bahwa sejak berakhirnya kolonialisme barat pada pertengahan abad ke-20 negara-negara muslim mengalami kesulitan dalam upaya mereka mengembangkan sintesis yang memungkinkan (viable) antara praktek dan pemikiran politik Islam dengan negara di tempat mereka masing-

masing, karena itu, di negara-negara tersebut hubungan politik antara Islam dan negara ditandai oleh ketegangan yang tajam, jika bukan masalah permusuhan sehubungan dengan posisi Islam yang menonjol di wilayah-wilayah tersebut yakni karena kedudukannya sebagai agama yang dianut sebagian besar penduduk, hal ini tentu saja merupakan kenyataan yang menimbulkan tanda tanya.

Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara Perspektif Modernis & Fundamentalis*, T.Noor Cahyadi, *Relasi Islam dan Negara Studi atas pemikiran kenegaraan M.Natsir dan SM. Kartosuwiryo*. Abdul Amin, *Negara Islam: Studi Atas Pemikiran Abul A'la AL Maududi dan Nurkholis Majid*. Agus Firman, *Relasi Islam dan Negara (Perspektif Soekarno dan Neo-modernisme Islam Indonesia)*. M.Ridwan, *Sikap Politik Partai Masyumi Pada Masa Pemerintahan Soekarno (1955-1960)*. Ahmad Affifudin, *Sistem Pemerintahan Indonesia Dalam Pandangan Partai Bulan Bintang*.

Selain itu masih banyak lagi buku-buku yang berkenaan dengan politik Islam Indonesia Khususnya partai Masyumi yang kesemuanya membahas tentang politik Islam Indonesia dan Masyumi, namun dari sekian buku yang dilacak penulis, belum ada yang secara spesifik memberikan sumbangan pemikiran berkenaan dengan kegagalan partai politik Islam khususnya Masyumi, karena itulah penulis berusaha untuk mengkaji dan menela'ah bagaimana dan penyebab apa saja yang menyebabkan politik Islam khususnya Masyumi gagal dalam mencapai tujuan.

Penulisan ini diharapkan dapat melahirkan kejelasan sejarah dan dapat menjadi panduan pijakan oleh umat Islam Indonesia dalam berpolitik. Untuk itu-

Iah penulis mengangkat skripsi ini berjudul: *Kegagalan Partai Politik Islam (Tela'ah Terhadap Politik Partai Masyumi)*.

E. Kerangka Teoretik.

Berhubung kajian ini masuk dalam wilayah kajian politik Islam, maka kajian ini tidak salah kalau di kaitkan dengan *Fiqh Siyāsah (fiqh Syar'iyah)*, dalam hal ini Abdurrahman Taj menyatakan : “*Siyāsah Sar'iyah* adalah hukum-hukum yang mengatur kepentingan negara dengan mengorganisir umat yang sejalan dengan jiwa syariat dan sesuai dengan dasar-dasarnya yang universal (*kulli*) untuk merealisasikan tujuan-tujuannya yang bersifat kemasyarakatan, sekalipun hal itu tidak ditunjukkan oleh nash-nash *tafshili* yang *juz'i* dalam al-Qur'an dan as-Sunnah.”¹⁷

Dari definisi diatas, dapat diambil asumsi bahwa selagi jalan yang di pakai umat Islam dalam berpolitik, batu pijakannya “*Syarī'ah*” (*Maqāshid al-Syarī'ah*) maka langkahnya dianggap tidak menyalahi aturan yang digariskan oleh Islam. Berbicara masalah *Maqāshid al-Syarī'ah*, kandungan *Maqāshid al-Syarī'ah* adalah kemaslahatan¹⁸. Menurut Muhammad Abu Zahrah dalam kaitan ini menegaskan tujuan hakiki hukum Islam adalah Kemaslahatan. Tak satupun hukum yang di syareatkan baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah melainkan

¹⁷ Dikutip oleh J. Suyuthi Pulungan, *al-Siyasat al-Jinaiyat Fi al-Syarī'at*, (Mishr, Maktabar Dar al-'Urabat, 1965), hlm. 10.

¹⁸ Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, cet.I, (Jakarta: PT RajaGarfindo Persada, 1996), hlm. 64.

didalamnya terdapat kemaslahatan.¹⁹ Kemaslahatan itu, melalui analisis *Maqāshid al-Syarī'ah* tidak hanya dilihat dalam arti teknis belaka, akan tetapi dalam upaya dinamika dan pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan kepada manusia. Menurut al-Syatibi kemaslahatan dapat dilihat dari 2 (dua) sudut pandang :

1. *Maqāshid al-Syar'i* (Tujuan Tuhan)
2. *Maqāshid al-Mukallaf* (Tujuan Mukallaf)

Maqāshid al-Syarī'ah dalam arti *maqāshid al-Syar'i*, mengandung empat aspek , yaitu :

- a. Tujuan awal dari Syariat yakni kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat.
- b. Syari'at sebagai sesuatu yang harus di pahami .
- c. Syari'at sebagai sesuatu hukum taklif yang harus dilakukan, dan
- d. Tujuan syareat adalah membawa manusia kebawah naungan hukum.²⁰

Kemaslahatan itu dapat di wujudkan apabila lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara, kelima unsur pokok itu menurut al-Syatibi adalah agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Dalam usaha mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok tersebut, beliau membagi kepada tiga tingkat *maqāshid* atau tujuan *Syarī'ah*, yaitu :

1. *Maqāshid al-Daruriyāt*
2. *Maqāshid al-Hajiyāt*.

¹⁹ Dikutip oleh Asafri Jaya Bakri, *Ushul A-Fiqh* (Mesir: Dar al-Fikr al-'Arabi, 1958) hlm. 366

²⁰ Dikutip oleh Asafri Jaya Bakri, *Nazariyah al-Maslaha Fhi -al-Fiqh al-Islami*, (Mesir: dar al-Nahdah al-'Arabiyyah, 1971), hlm.5

3. *Maqāshid al-Tahsiniyāt*.

Maqāshid al-Daruriyāt dimaksudkan untuk memelihara lima unsur pokok dalam kehidupan manusia diatas. *Maqāshid al-Hajiyāt* dimaksudkan untuk menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan terhadap lima unsur pokok menjadi lebih baik lagi. Sedangkan *maqshid al-Tahsiniyāt* dimaksudkan agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk penyempurnaan pemeliharaan lima unsur pokok.²¹

Lebih dari itu, dalam kajian terhadap *siyāsah syar'iyah* meliputi tiga aspek utama yaitu :

1. *Dusturiyah* (tata negara), yang meliputi aturan pemerintahan, prinsip dasar yang berkaitan dengan pendirian suatu pemerintahan serta aturan berkaitan dengan hak-hak pribadi, masyarakat dan negara;
2. *Kharijiyah* (luar negeri), yang meliputi hubungan negara dengan negara lainnya, kaidah yang melandasi hubungan ini, dan tata aturan tentang keadaan perang dan damai; dan
3. *Māliyah* (harta), yang meliputi sumber-sumber keuangan dan belanja negara.²²

Dengan demikian, dikarenakan yang diteliti adalah kegagalan partai politik Islam, tela'ah terhadap politik partai Masyumi, maka kajian ini termasuk dalam kajian *siyāsah syar'iyah*, khususnya masalah *dusturiyyah* (tata negara).

²¹ Asafri Jaya Bakri, *Konsepsi Maqashid Syari'ah*, ... hlm. 71-73

²² Dikutip oleh Kamaruzzaman, *Ensiklopedi Hukum Islam*, V:1267.

Berkaitan dengan hal di atas umat Islam dalam memahami hubungan Islam dengan ketatanegaraan, terbagi atas tiga aliran²³. **Pertama**. Berpendirian bahwa Islam bukanlah semata-mata agama dalam pengertian Barat, yakni hanya menyangkut hubungan antara manusia dan Tuhan, sebaliknya Islam adalah suatu agama yang sempurna dan lengkap dengan pengaturan segala aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan bernegara. **Kedua**, berpendirian bahwa Islam adalah agama dalam pengertian Barat, yang tidak ada hubungannya dengan kenegaraan, menurut aliran ini Muhammad hanyalah rasul biasa seperti rasul-rasul sebelumnya dan nabi tidak pernah dimaksudkan untuk mendirikan dan mengepalai satu negara. **Ketiga**, aliran ini menolak dua pendapat di atas, aliran ini berpendirian bahwa dalam Islam tidak terdapat sistem kenegaraan, tetapi terdapat seperangkat nilai etika bagi kehidupan bernegara.

E. Metode Penelitian.

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan studi pustaka, (*library research*) yang objek utamanya buku-buku dan tulisan-tulisan yang berkaitan secara langsung dengan objek yang diteliti, penelitian ini merupakan studi yang lebih pada olahan filosofis dan teoritis.

2. Sifat Penelitian.

Penelitian ini bersifat deskriptif – analitis, yaitu memberikan gambaran yang jelas dan menganalisa persoalan secara metodologis.

²³ Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara, Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Edisi kelima. (Jakarta: UI Press, tahun 1993), hlm.1-2

3. Teknik Pengumpulan Data.

Berdasarkan objek penelitian, maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah penela'ahan terhadap bahan-bahan pustaka yang terkait dengan masalah yang dimaksud, yaitu bahan-bahan primer: meliputi buku-buku, tulisan-tulisan yang langsung membahas tentang partai politik Islam khususnya partai Masyumi, sedangkan bahan-bahan sekunder: buku-buku, tulisan-tulisan yang mendukung untuk memperdalam penelitian ini.

4. Metode analisis Data.

Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode berpikir deduktif-induktif.

5. Pendekatan Studi.

Studi ini menggunakan pendekatan politis dan historis. Dalam Perspektif oksidentalisme (studi kebaratan) ada lima pendekatan penelitian bidang politik,²⁴ pendekatan : historis, realis, idealis, marxis dan empiris (scientist)

- a. Pendekatan historis beranggapan bahwa politik suatu bangsa tidak mungkin dapat dipahami tanpa mempelajari latar belakang sejarah bangsa.
- b. Pendekatan realis berasumsi bahwa politik harus dimainkan dengan cara realistis, kekuasaan (*power*) adalah esensi politik. Pendekatan realis bersifat normatif (*preskriptif*) berhubung ia menganjur dipraktekkan politik yang berorientasi pada kekuasaan, bahkan jika perlu dengan cara-cara amoral. Prioritas tertinggi harus diletakkan pada terpenuhinya kepentingan sendiri (*self interest*).

²⁴ Muhammad Azhar, *Filsafat Politik perbandingan antara Islam dan Barat*, cet I, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996), hlm. 18-19.

- c. Pendekatan idealis (lawan pendekatan realis) juga bersifat normatif dalam arti ia menunjukkan apa yang harus dilakukan oleh aktor politik. Hanya bedanya, jika kaum realis menganjurkan agar aktor politik melepaskan sikap dan tingkah laku yang tidak efektif, yang tidak bersandar pada prinsip-prinsip moral dan menggantinya dengan tindakan-tindakan yang berdasarkan akal sehat, pengetahuan yang akurat, kemampuan pengendalian diri (*self restraint*) dan rasa "tepa selira" (*compassion*).
- d. Pendekatan Marxis dianggap sebagai pendekatan lain dari pendekatan idealis. Pendekatan Marxis berasumsi bahwa hubungan ekonomi adalah basis tingkah laku politik dan mencoba menerangkan bahwa persoalan-persoalan politik dapat diselesaikan "jika perjuangan kelas antara kaum kapitalis dan kaum pekerja (*proletariat*) dan kemudian dibentuk kediktatoran proletariat (*dictatorship of the proletariat*).
- e. Pendekatan empiris (*scientist*) berpendapat bahwa politik haruslah sekedar diamati (*diobservasi*) dan dilaporkan seperti apa adanya (*what is atau what is has been*), bukan seperti apa seharusnya (*what is should be*). Pendekatan terakhir ini menganggap bahwa bias-bias dan nilai-nilai si analis atau si pengamat politik tidak boleh ikut mewarnai tentang realitas politik.²⁵

Adapun pendekatan historis yang sering dipakai dalam melakukan penelitian untuk mempermudah dalam meneliti sejarah Islam ada tiga yaitu .²⁶

²⁵ Dikutip oleh Muhammad Azhar, *Politik Internasional Dewasa Ini*, (Surabaya: Usaha Nasional, 1989), hlm. 87-88, .

Pertama, Sistem Vertikal, yaitu: membicarakannya hanya dari sudut pusat pemerintahan . pada umumnya ahli-ahli sejarah Islam menyusun sejarahnya secara Vertikal.

Misalnya Muhammad Kurdi Ali membaginya menjadi 6 zaman yaitu :

- a. a.Zaman Rasul, berlaku hanya 10 tahun, semenjak dari hijrahnya Nabi Muhammad kemadinah pada 12 Rabi'ul awal 1H. = 28 Juni 622 sampai meninggalnya 12 Rabi'ul Awal 11 H. = 2 Juni 632 M. Selama 10 tahun, berpusat di kota Madinah.
- b. b.Zaman Khulafaur Rasyidin, yaaitu masa khalifah-khalifah yang
- c. berempat, selama 30 tahun lamanya, dari 11 H. = 632 M. sampai 40 H. = 662 H., dengan 4 orang kepala Negara, berpusat dimadinah.
- d. c.Zaman Umayyah, berjalan 92 tahun lamanya sejak dari 40 H. = 662 M sampai 132 H. = 754 M., dengan 14 orang kepala Negara, berpusat di kota Damsyiq (*Damascus*), Syria.
- e. d.Zaman Abbasyiyah, berjalan 518 tahun lamanya, sejak dari 132 H. = 754 sampai 656 H. = 1258 M. ; dengan 37 orang kepala Negara, berpusat Dikota Bagdad.
- f. e.Zaman kerajaan-kerajaan kecil (*muluk et thawaiif*), baik di benua timur maupun di benua barat (*Andalus*), yang masuk menyusup kedalam zaman yang ke-4 di atas, yaitu dari 321 H. = 933 M. sampai 685 H. = 1288 M., berjalan 350 tahun

²⁶ Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu Politik Islam III. sejarah Islam dan umatnya sampai sekarang perkembangannya dari zaman ke zaman* cet I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), hlm.32-61

- g. lamanya, dengan kepala-kepala Negara yang bermacam-macam panggilannya, dan pusat kerajaannya bermacam-macam Ibu Kota pula.
- h. f.Zaman Utsmaniyah Turki, berjalan 666 tahun lamanya, dari 687 H. = 1288 M. sampai 1343 H. = 1924 M., dengan 38 Sulthan (kepala Negara), dengan berpusat di kota Istanbul (*Konstantinopel*).

Jadi jika dikeluarkan zaman ke-5 maka dengan berturut-turut kepala Negara Islam berjumlah 94 orang, dengan pusat-pusat pemerintahan : Madinah, Damascus, Bagdad, dan Istanbul.

Kedua, Sistem Horizontal, yaitu disamping pemusatan kekuasaan Islam, maka cara lain yang lebih meliputi ialah kalau sejarah itu dilakukan merata dan meluas kepada seluruh wilayah Negara Islam. Tidak hanya pusat pemerintahan saja yang di bicarakan, tetapi perkembangan yang terjadi di seluruh wilayah kaum muslimin. Sungguhpun pada lahirnya hanya 4 buah Ibu Kota Negara Islam, dan hanya dua bangsa yang tampil memegang kekuasaan pusat, yaitu bangsa Arab dan bangsa Turki, tetapi pada hakekatnya kekuasaan itu sudaah diberikan secara bergiliran kepada berbagai bangsa di dalam Islam.

Ketiga, Sistem Bangsa-Bangsa, hampir sejalan dengan dua sistem di atas tetapi memakai dasar yang lain, yaitu menjelajah sejarah Islam dari sudut bangsa yang memegang kekuasaan. Pada suatu saat ia berjalan dengan system Vertikal, karena bangsa yang di sebutkan memegang kekuasaan dipusat , tetapi pada waktu ia paralel dengan system Horizontal, karena kekuasaanya terletak didaerah tertentu, tetapi mempunyai pengaruh yang menentukan.

Dalam hal penyusunan pembuatan skripsi ini peneliti menggunakan pendekatan politik dan historis, adapun pendekatan politik dengan menggunakan metode pendekatan historis karena tidak mungkin ada politik, kalau tidak mengetahui akan sejarah,²⁷ begitu juga dengan penelitian ini, peneliti menggali latar belakang masyumi yang menurut para “pemikir” telah gagal dalam menjalankan politik praktisnya dalam arena perpolitikan Indonesia. Sedangkan pendekatan kedua yaitu : pendekatan Historis, dengan menggunakan metode pendekatan Sistem Vertikal, peneliti mencoba menggambarkan dan memaparkan realitas sejarah perpolitikan Indonesia semasa Masyumi, yaitu dimulai tahun 1945 sampai dibubarkannya partai ini oleh Sukarno tahun 1960.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih memudahkan pemahaman tentang isi dan esensi penulisan skripsi ini, serta memperoleh penyajian yang serius, terarah dan sistematis, penulis menyajikan pembahasan skripsi ini menjadi lima bab dengan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama : merupakan pendahuluan yang mengantarkan pembaca pada latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penulisan, tinjauan pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab selanjutnya merupakan pembahasan penulisan skripsi, yang terbagi pada tiga bab. Untuk memberikan penjelasan tentang politik Islam agar

²⁷ Zainal Abidin Ahmad, *Ilmu Politik Islam, Konsepsi Politik dan Ideologi Islam*, cet. I, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977), II: 234

pembahasan lebih mengarah, pada bab kedua, dibahas mengenai gambaran umum politik dan Islam-politik. Bab ini dibagi beberapa sub-bab, yakni mengenai: pengertian politik dan tinjauan teoritis terhadap Islam dan Politik serta sejarah perjalanan politik umat Islam di Indonesia pada pra dan pasca kemerdekaan.

Untuk mendapatkan pemaparan yang jelas tentang gagalnya Masyumi sebagai partai politik Islam terbesar di Indonesia dalam merealisasikan tujuan, yang merupakan titik permasalahan dalam penyusunan skripsi ini, maka dalam bab ketiga ini dibahas tentang sejarah partai ini didirikan hingga partai ini bubarkan. Bab ini juga menjelaskan bagaimana Masyumi dalam percaturan politik Indonesia dalam merealisasikan tujuan partai dan umat, selaku partai Islam terbesar pada masanya. Kemudian, disini juga dijelaskan prestasi dan rintangan yang dihadapi Masyumi dalam berpolitik, baik ketika berhadapan dengan penjajah maupun dengan Negara.

Pada bab selanjutnya merupakan pembahasan inti. Bab ini membahas tentang analisa kegagalan partai politik Islam khususnya Masyumi dalam pergolakan politik yang terjadi, yaitu usaha Masyumi merealisasikan tujuannya yang dibenturkan dengan keadaan yang merugikan partai dan umat.

Untuk mengetahui kesimpulan akhir dalam penulisan skripsi, disini penulis menyajikannya didalam bab kelima yang sekaligus merupakan penutup, yang berisi kesimpulan pembahasan bab-bab sebelumnya dan saran-saran yang menjadi semacam agenda pembahasan lebih lanjut dimasa mendatang tentang eksistensi perjuangan baik berupa partai maupun suatu pergerakan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pemahaman umat Islam terhadap politik masih parsial, majemuk. Hal ini dapat dimaklumi karena Islam sendiri tidak memberikan teori, konsep secara nyata dan baku terhadap umat, bagaimana umat harus berpolitik, menyikapi politik dan kesemua yang berkenaan dengan politik. Sehingga ketika umat dihadapkan dengan konsep politik di luar Islam maka umat belum siap untuk menyuguhkan konsep tandingan.

Selepas diproklamirkannya kemerdekaan RI, dan Belanda menginginkan kembali Indonesia, seluruh komponen Masyarakat bersatu dan melepaskan semua perbedaan yang ada dan merapatkan barisan demi merebut kembali kedaulatan RI dari tangan penjajah. Kemudian, demokrasi liberal berkembang namun kesiapan masyarakat tidak terlihat pada masa transisi ini. Pada masa ini juga dikeluarkannya manifesto politik oleh pemerintah yang membolehkan masyarakat mendirikan partai, dan disambut meriah oleh masyarakat, termasuk juga umat Islam. Disini terlihat bahwa sistem multi partai yang berlebihan, penyaluran input yang sangat besar tidak diimbangi dengan kesiapan kelembagaan untuk menampungnya. Akibatnya dengan meningkatnya partisipasi maka terjadi krisis dalam wujud labilitas pemerintahan/politik ketika itu. Dalam periode ini perjuangan politik Islam pada umumnya dicirikan sedikitnya oleh tiga hal :

1. Penekanan pada perjuangan Islam politik yang bersifat formal dan ideologis;

2. Wawasan yang terbatas mengenai makna politik Islam, yang pada gilirannya mengarah pada dipilihnya parlemen sebagai lapangan bermain yang utama; dan
3. Perhatian yang berfokus kepada kepentingan-kepentingan partisan yang mengakibatkan, antara lain, berkembangnya sudut pandang komunalistik mengenai Islam (yakni definisi yang sempit mengenai *ummah*, yang hanya mencakup mereka yang bergabung dengan organisasi-organisasi social-politik Islam).

Dengan adanya ciri-ciri pergerakan tersebut menyebabkan berkembangnya politik eksklusivisme di kalangan para pemimpin dan aktivis Islam politik. Dan hal inilah yang turut menyebabkan merosotnya Islam sebagai sebuah kekuatan politik. Begitu juga yang dialami oleh Masyumi sebagai partai Islam terbesar pada zamannya, pada akhir perjalanannya dibubarkan oleh Sukarno. Kendatipun demikian, Masyumi juga ikut andil dalam pergerakan mempertahankan kedaulatan RI, terbukti dengan dilakoninya beberapa peristiwa penting, yang kesemuanya banyak tidak luput dari peran sentral dari para Tokoh Masyumi. Pergolakan politik, tidak saja terjadi hubungannya dengan penjajah tapi juga dari dalam negeri, berbagai macam gerakan sparadis yang ingin merdeka dan merebut kedaulatan RI (kudeta) juga bermunculan.

Dalam menjalankan politik praktisnya, masyumi, dalam merealisasikan tujuan partai lebih banyak terlihat dalam jalan formal yaitu melalui pemilu dan dalam Majelis Konstituante. Namun dari kedua jalan tersebut Masyumi menghadapi kebuntuan. Dari kedua jalur ini-lah diambil kesimpulan bahwa

Masyumi mengalami kekalahan. Adapun faktor-faktor penyebab gagalnya Masyumi sebagai partai Islam dan fasilitator penampung dan penyalur aspirasi umat adalah : pertama, faktor Eksternal yaitu berhadapan dengan lawan politik yang lebih kuat, kedua, faktor internal, yaitu faktor dari dalam tubuh partai Masyumi sendiri yaitu: keluarnya beberapa organisasi Islam dari Masyumi.- Masyumi selaku partai Islam terbesar, di Konstituante nampak tidak siap mengajukan konsep tentang "Negara Islam".- Masyumi terlena dengan idealismenya.- Para pemimpin Masyumi belum bisa mengayomi semua kepentingan yang ada tiap golongan dalam tubuh partai.

B. Saran-saran.

1. Berdasarkan penyusunan yang dilakukan, penyusun menyarankan kepada para politikus, partai dan para aktivis pergerakan Islam, dalam menjalankan politik praktisnya, terutama dalam merealisasikan tujuannya hendaknya tidak terjebak ke dalam idealisme yang berlebihan sehingga menyebabkan fanatik buta terhadap ideologinya. Hal ini akan berimbas pada tidak menerima adanya perbedaan dan pada gilirannya nanti menghalalkan segala cara, politik sifatnya temporal tergantung pada kondisi dan situasi yang berkembang.
2. Penyusun mengharapkan, untuk diadakannya penelitian lebih lanjut tentang politik Islam Indonesia, khususnya tentang Masyumi. Sejarah memang tidak bisa diulangi, tetapi sejarah dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam menentukan langkah.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta, 1984/1985)

B. Fikih

Azhar, Muhammad, *Filsafat Politik Perbandingan antara Islam dan Barat*, cet. Pertama, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1996)

A.Boisard, Marcel, *Humanisme dalam Islam*, cet. Pertama, Edisi Bahasa Indonesia, (Jakarta: Bulan Bintang, 1980)

Abdullah, Taufik, *Islam dan Masyarakat Pantulan Sejarah Indonesia* cet.II. (Jakarta: PT. Pustaka LP3ES Indonesia, 1996)

Abidin Ahmad, Zainal, *Ilmu Politik Islam II, Konsepsi Politik dan Ideologi Islam*, cet. Pertama, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977)

_____, *Ilmu Politik Islam Jilid I*, cet. Pertama, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977)

_____, *Ilmu Politik Islam III, Sejarah Islam dan Umatnya Sampai Sekarang Perkembangannya Dari Zaman Ke Zaman*, cet. Pertama, (Jakarta: Bulan Bintang, 1977)

Effendy, Bahtiar, *Islam dan Negara Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia*, cet. I (Jakarta: Paramadina, 1998)

_____, *Teologi Baru Politik Islam Pertautan Agama, Negara, dan Demokrasi*, (Jogjakarta: Galang Press, 2001)

Jaya Bakri, Asafri, *Konsep Maqashid Syari'ah Menurut Al-Syatibi*, cet. Pertama, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996)

Kamaruzzaman, *Relasi Islam dan Negara Perspektif Modernis & Fundamentalis*, cet. Pertama, (Jogjakarta: Indonesiatara, 2001)

Ma'arif, A. Syafi'i, *Islam dan Politik di Indonesia Pada Masa Demokrasi Terpimpin (1959-1965)*, cet. I, (Jogjakarta: IAIN Su-Ka Press, 1988)

_____, *Studi Tentang Percaturan Dalam Konstituante Islam dan Masalah Kenegaraan*, cet.III, (Jakarta: LP3ES, 1996)

Al-Maududi, Abul A'la, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam* cet.VI (Bandung: Mizan, 1998)

Pulungan, J. Suyuthi, *Fiqh Siyasah Ajaran, Sejarah dan Pemikiran* cet. III, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1997)

Salim, Abd Muin, *Fiqh Siyasah, Konsepsi Kekuasaan Politik Dalam Al-Qur'an*. cet. I, (Jakarta: Rajawali Press, tahun. 1994)

Sjadzali, Munawir. *Islam dan Tata Negara Ajaran, Sejarah dan Pemikiran*, Edisi Kelima, (Jakarta: UI Press, 1993)

Tobroni dan Samsul Arifin, *Islam dan Pluralisme Budaya dan Politik*, cet Pertama, (Yogyakarta: Sipress, 1994)

Taimiyah, Ibnu, *Siyasah Sar'iyah Etika Politik Islam*, cet. pertama, diterjemahkan oleh Rofi' Munawwar, (Surabaya, Risalah Gusti, 1995)

C. Lain-Lain

Ahmad, Akbar S, diterjemahkan oleh Nunding Ram, Ramli Yakub, *Citra Muslim Tinjauan Sejarah dan Sosiologi*, cet. Pertama, (Jakarta: Erlangga, 1992)

Ali, Mukti, *Agama dalam Pergumulan Masyarakat Kontemporer*. (Jogjakarta: PT. Tiara Wacana, 1998)

Awwas, Irfan S, *Menelusuri Perjalanan Jihad SM. Karto Suwiryo, Proklamator Negara Islam Indonesia*, cet. Pertama, (Jogjakarta: Wihdah Press, 1999)

Budiarjo, Meriam, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cet.14, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992)

Cipto, Bambang, *Prospek dan Tantangan Partai Politik* cet. I. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996)

Dhakidae, ed, Daniel, *Pemilihan Umum di Indonesia; Saksi Pasang Surut Partai Politik* (Kumpulan Karangan Dari Majalah Prisma tentang Demokrasi dan Politik), cet. I, (Jakarta: LP3ES, 1986)

Harjono, M.,Anwar, *Perjalanan Politik Bangsa, Meoleh Kebelakang Menatap Masa Depan*. (Jakarta: Gema Insani Press, 1997)

Isnail, Faisal, *Ideologi Hegemoni dan Otoritas Agama Wacana Ketegangan Kreatif Islam dan Pancasila*. cet.I, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1999)

- J. Benda, Harry, *Bulan Sabit dan Matahari Terbit Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang*, (Jakarta: PT. Dunia Pustaka Jaya, 1985) dialih bahasa oleh Daniel Dekidae.
- Kumpulan Dari Karangan Majalah Prisma, *Demokrasi dan Proses Politik* (Jakarta: LP3ES, 1986)
- Luth, Thohir, *M. Natsir Dakwah dan Pemikirannya*, cet. I (Jakarta: Gema Insani Press, 1999)
- Mahendra, Yusril Ihza, *Dinamika Tatanegara Indonesia Kompilasi Aktual Masalah Konstitusi Dewan Perwakilan Dan Sistem Kepartaian*, (Jakarta: Gema Insani Press, cet. Pertama, 1996)
- Mansur Suryanegara, Ahmad, *Menemukan Sejarah Wacana Pergerakan Islam di Indonesia*, cet.III, (Bandung: Mizan, 1996)
- Noer, Deliar, *Partai Islam di Pentas Nasional, Kisah dan Analisis perkembangan Politik Indonesia 1945-1965*, cet. II, (Mizan, 2000)
- Noer, Deliar, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, edisi revisi cet.VII, (Bandung: Mizan Media Utama (MMU), 2001)
- _____, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942* cet. Kedelapan, (Jakarta: PT, Pustaka LP3ES Indonesia, 1996)
- _____, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, edisi bahasa Indonesia cet. Kedelapan, (Jakarta: PT, Pustaka LP3ES Indonesia, 1996)
- Samsuri, *Pollitik Islam Anti Komunis Pergumulan Masyumi dan PKI di Arena Demokrasi Liberal*, cet.I, (Yogyakarta: Safiria Insania Press bekerjasama dengan Magister Studi Islam UII, 2004)
- Samit, Arbi, *Sistem Politik Indonesia Kestabilan Peta Kekuatan Politik dan Pembangunan*, cet. VII, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1993)

TERJEMAHAN

No	Bab	FN	Hlm	Terjemahan
01	II	15	32	Maka disebabkan rahmat Allah-lah kamu berlaku lemah lembut kepada mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. Karena itu maafkanlah mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Kemudian apabila kamu membentangkan tekad, maka bertawakallah kepada Allah, sesungguhnya Allah menyukai orang yang bertawakal kepada-Nya. (Q.S. 3:159)
03	II	16	32	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. (Q.S. 42:38)
04	IV	7	95	Sesungguhnya kami tidak akan mengangkat seorang yang meminta jabatan dalam perkara kami (H.r. Bukhari-Muslim)

BIOGRAFI TOKOH/ULAMA'

M. NATSIR.

M. Natsir yang bergelar Datuk Sinaro Panjang, terlahir di Jembatan Berukir Alahan Panjang, Kabupaten Solok, Sumatera Barat pada hari Jum'at tanggal 17 Jumadil Akhir 1326 H, bertepatan dengan tanggal 17 Juli 1908 dari seorang wanita yang bernama Khadijah. Ayahnya bernama Mohammad Idris Sutan Saripado, seorang pegawai rendah yang pernah menjadi juru tulis pada kantor Kontroler di Maninjau. Pada tahun 1918, ia dipindahkan dari Alahan Panjang ke Ujung Pandang (Sulawesi Selatan) sebagai sipir (penjaga tahanan). M. Natsir mempunyai tiga orang saudara kandung yaitu Yukinan, Rubiah, dan Yohanusun.

Di tempat kelahirannya itu, ia melewati masa-masa sosialisasi keagamaan dan intelektualnya yang pertama. Ia menempuh pendidikan dasar di sekolah Belanda dan mempelajari agama dengan tekun pada beberapa alim ulama. Ia masuk sekolah partikelir HIS (*Holland Inlandische School*) Adabiah di Padang. Kemudian ia dipindahkan ke HIS pemerintah di Solok oleh ayahnya yang telah beberapa bulan sekolah di Padang. Ia menamatkan HIS pada tahun 1923. antara tahun 1916 hingga tahun 1923, ia belajar HIS dan Madrasah Diniyah di Solok dan Padang. M. Natsir masuk MULO (*Meer Uitgebredid Lager Onderswijs*) di Padang dan meneruskan pendidikan formalnya ke *Algememe Midelbare School* (AMS) Afdelling A di Bandung dan meraih gelar *Meester in de Rechten* (MR) dan di kota ini, ia bertemu dengan tokoh radikal Ahmad Hassan, pendiri Persis, yang diakuinya sangat mempengaruhi alam pemikirannya. setelah belajar di AMS, M. Natsir tidak melanjutkan kuliah, melainkan mengajar di salah satu MULO di Bandung dan mendirikan Lembaga Pendidikan Islam (Pendis), suatu pendidikan modern yang mengombinasikan kuerikulum pendidikan umum dengan pendidikan pesantren. Pada masa mudanya ia masuk anggota Pandu National Islamietische Pavinderij, sejenis pramuka sekarang, dari perkumpulan *Jong Islamieten Bond* (JIB) Padang.

Pada tahun 1938, M. Natsir mulai aktif di bidang politik, mendaftarkan dirinya menjadi anggota Partai Islam Indonesia (PII) cabang Bandung. Beliau menjabat ketua PII bandung pada tahun 1940 hingga tahun 1942. pada masa penjajahan Jepang (1942-1945) ikut dalam MIAI dan kemudian berubah menjadi Masyumi, selanjutnya mengantarkan beliau menjadi ketuanya hingga partai tersebut dibubarkan. M. Natsir dikenal sebagai birokrat, politisi, dan juga sebagai da'i ternama. Sebagai birokrat, ia sebagai menteri penerangan dalam kabinet Sjahrir dan perdana menteri pertama pada masa pemerintahan Soekarno. Sebagai politisi, ia menduduki jabatan puncak partai Islam terbesar, yaitu Masyumi dan memperjuangkan Islam sebagai dasar negara. Adapun sebagai dai ternama, M. Natsir menjadi Wakil Presiden *Muktamar Alam Islami* sekaligus sebagai tokoh puncak *Rabithah Alam Islami*, serta menjadi Ketua Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (1967-1993). M. Natsir wafat pada tanggal 6 Februari 1993/14 Sya'ban 1413 H, di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta, dalam usia 85 tahun.

SUKIMAN WIRYOSANJOYO

Dilahirkan di kampung Sewu, Surakarta tahun 1898 M, dari keluarga yang cukup taat kepada agama. Setelah selesai mengikuti pelajaran pada tingkat dasar di Surakarta, beliau melanjutkan pelajarannya di sekolah kedokteran, STOVI di Jakarta, lulus tahun 1922 dan meneruskannya di Fakultas Kedokteran Universitas Amsterdam di Belanda sampai lulus tahun 1925. pada tahun 1927 pulang ke Indonesia dan bergabung ke dalam Partai Syarekat Islam, menjabat sebagai ketua bagian Keuangan Pengurus Besar partai. Tahun 1933 keluar dari PSI dan mendirikan partai sendiri yaitu Partai Islam Indonesia (PARRI), partai ini kemudian dikembangkan dan menjadi PII (Partai Islam Indonesia). Dalam periode pertama Sukiman menjadi Wakil Ketua PII. Tahun 1939 Sukiman mewakili kaum buruh internasional di Genewa, Swiss, dan menyampaikan pidatonya di sana. Beliau juga ikut membenahi MIAI karena beliau termasuk orang yang mendambakan terwujudnya kesatuan umat Islam Indonesia, selebih itu ia juga sebagai anggota BPUPKI di Jakarta. Sampai tahun 1949 Sukiman aktif sebagai ketua Masyumi, ia pun aktif sebagai anggota KNIP (Komite Nasional Indonesia Pusat), menjadi anggota Dewan Penasehat Tinggi Negara, menjadi anggota delapan ke Konfrensi Meja Bundar (KMB) di Den Haag. Tahun 1949-1950 Sukiman menjadi anggota DPR RIS, dan tahun 1951-1952 menjabat Perdana Menteri Indonesia. Beliau juga sebagai Pembina di Universitas Islam Indonesia dan sebagai penasehat PP Muhamadiyah. Dan kemudian tanggal 23 Juli 1974 di Yogyakarta beliau meninggal dunia. Semasa hidupnya beliau dikenal sebagai orangnya Islam dan Nasionalis.

SOEKARNO

Kusno, nama kecilnya, lahir di Lawang Seketeng, Surabaya 6 Juni 1901. menempuh pendidikan formal melalui sekolah angkatan satu, Mojokerto, kemudian dipindahkan oleh ayahnya pada saat duduk di kelas empat ke ELS (*Europese Lagere School*), Mojokerto, setelah lulus dari ELS kemudian melanjutkan ke HBS (*Hogere Burger School*), Surabaya, THS (*Techniscche Hooge School*) sekarang menjadi ITB (Institut Teknologi Bandung) lulus pada tahun 1926. Selain pendidikan formal beliau juga mengenyam pendidikan informal yakni pendidikan keluarga dan pendidikan yang didapatinya melalui pengalaman di tengah masyarakat, bahkan sebagian kalangan berpendapat bahwa melalui pendidikan informal inilah sebenarnya banyak mempengaruhi pola pikir Soekarno dikemudian hari baik dalam bidang politik, agama, filsafat, maupun sejarah. Sedangkan dari segi aktivitas masa mudanya antara lain; menjadi ketua bagian pengajaran Muhamadiyah, Bengkulu, aktif bertabligh, menulis artikel-artikel tentang Islam dan segi kehidupan lainnya. Namun yang lebih penting adalah bahwa beliau termasuk bapak pendiri bangsa Indonesia sampai terjadinya gerakan pemberontakan G 30 S/PKI (1945-1965). Beliau meninggal dunia bertepatan pada hari Minggu 21 Juni 1970.

CURRICULLUM VITAE

Nama : Arisandi
NIM : 99373421
Tempat/Tanggal Lahir: Sepang 27 Juni 1978

Riwayat Pendidikan:

1. SDN Sepang Lulus Tahun 1992
2. MTS Raudhatul Ulum Lulus tahun 1995
3. MAK Raudhatul Ulum Lulus Tahun 1998
4. Fakultas Syari'ah UIN Su-Ka 1999...

Identitas Orang Tua:

Nama Bapak : Rozali H. Tunggal
Pekerjaan : Wiraswasta
Nama Ibu : Sarida Medan
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jln. Silah Beranti No. 9 RT. 13/09 8 Ulu Plaju Palembang 30257